

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Periode Tahun 2013- 2018

Nurfitri Martaliah<sup>1)</sup>, Puji Wahyuli<sup>2)</sup>, Salmia<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> STAI Ahsanta Jambi, Indonesia

<sup>1</sup>[nmartaliah@yahoo.com](mailto:nmartaliah@yahoo.com), <sup>2</sup>[Puji.wahyuli0787@gmail.com](mailto:Puji.wahyuli0787@gmail.com), <sup>3</sup>[Salmiaumy@gmail.com](mailto:Salmiaumy@gmail.com)

**Abstrak.** Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Melalui pengukuran kinerja dapat diketahui kemajuan suatu organisasi, serta meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan, dan termasuk akuntabilitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah kota Jambi, penelitian dilakukan di kantor walikota dan data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, untuk mengukur kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi, begitu juga dengan rasio kemandiriannya masih sangat rendah. Saran untuk pemerintah Kota Jambi sebagaimana lebih meningkatkan PAD melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah.

**Kata Kunci:** *Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan, PAD*

**Abstract.** Performance measurement is a method or tool used to record and assess the achievement of the implementation of activities based on goals, objectives, and strategies. Through performance, the measurement can be seen as the progress of an organization, as well as improving the quality of decision making, and including accountability. The purpose of this study was to determine the financial performance of the Jambi city government, the research was conducted at the mayor's office and the data used was quantitative data in the form of a Budget Realization Report (LRA). The method used is a quantitative descriptive method, to measure financial performance through financial ratios. The results showed, if viewed from the Fiscal Decentralization Degree Ratio can be categorized as very less, the ratio of regional financial dependence to the central and provincial governments is still very high, as well as its independence ratio is still very low. Suggestions to the Jambi City government to further increase PAD through regional sector tax and retribution revenue.

**Keywords:** *Financial Ratios, Financial Performance, PAD*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan anggaran daerah sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah, karena pemerintahan daerah merupakan organisasi yang secara otonomi diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan nasional di suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor

33 Tahun 2004, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2015) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan replikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahayu (2014) yang melakukan analisis rasio untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012. Dalam penelitiannya Rahayu (2014) menyebutkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Grobogan berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik. Pola hubungan kemandirian daerah Kabupaten Grobogan dalam lima tahun terakhir masih menunjukkan pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56%. Pencapaian rasio kemandirian ini masih tergolong rendah.

Penelitian yang dilakukan Mentari Wachid, dkk. (2013) menyebutkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Malang tahun 2008-2012 dapat dikatakan baik karena setiap tahun dapat mengoptimalkan kemampuan keuangannya meskipun hasil persentasenya masih berada dalam kategori kurang mampu. Selain itu kinerja keuangan tahun 2008-2012 juga menunjukkan tren positif karena setiap tahunnya dapat meningkatkan kinerjanya dan

perolehan SILPA tahun berjalan selalu meningkat yang dikarenakan adanya efisiensi PAD komponen belanja daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Kota Jambi, karena itu Pemerintah Kota Jambi sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah Kota Jambi berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Masyarakat sebagai salah satu sumber daya pembangunan yang memegang dua peranan penting dalam pembangunan yaitu sebagai subjek atau perilaku sekaligus sebagai objek pembangunan menginginkan adanya transparansi anggaran keuangan yang ada pada Pemerintah Kota Jambi, sehingga masyarakat atau penduduk juga dapat memantau kinerja Pemerintah Kota Jambi apakah dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Berkaitan dengan hal tersebut, serapan anggaran Kabupaten dan Kota masih rendah. Sampai dengan bulan September 2017 (triwulan ketiga) rata-rata serapan anggaran untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi baru mencapai angka 49%. Serapan anggaran tertinggi adalah Kabupaten Kerinci, yaitu mencapai 87%, dan terendah adalah Kota Jambi yang hanya mencapai 42%. Selain itu, APBD Kota Jambi lebih banyak digunakan untuk belanja rutin, seperti membayar gaji pegawai (Bappeda Provinsi Jambi, 2018). Sesuai dengan alasan tersebut, maka dalam penelitian ini dipilih Kota Jambi sebagai lokasi penelitian.

Penelitian ini menjadi menarik, mengingat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah menuntut setiap pemerintah daerah harus mampu menjalankan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun sampai saat ini masih banyak pemerintah daerah yang masih tergantung pada pemerintah pusat, khususnya berkaitan dengan aspek keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2017”.

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif Menurut Arikunto (2006) adalah penelitian yang datanya berupa angka-angka yang dihitung secara matematis. Metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan yang didukung oleh media cetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, laporan dari berbagai sumber, dan juga media elektronik, terutama internet di mana data merupakan sumber sekunder. Selain data sekunder diatas penulis juga menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara bersama pihak yang kompeten dalam menjawab persoalan penelitian ini. Setelah didapatkan datanya, maka data-data diatas akan dianalisis dalam kerangka teoritis yang telah ditentukan untuk membuktikan bahwa hipotesis itu akurat dan akhirnya dapat menjawab pertanyaan penelitian. Objek yang diteliti yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi tahun 2013-2018. Penelitian dilakukan dengan pencarian data sekunder yang berupa data khusus berupa Laporan Rencana dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2013-2018.

Teknik analisa data yang digunakan deskriptif kuantitatif berikut ini:

##### 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\%$$

Keterangan:

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD<sub>t</sub> = Total Pendapatan Asli Daerah tahun t

TPDt = Total Pendapatan Daerah tahun t

##### 2. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Widodo, 2015). Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah:

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Keterangan:

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Total Pendapatan Asli Daerah

##### 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas PAD dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

##### 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

##### 5. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rasio Belanja Modal}}{\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Analisis Kinerja Keuangan Kota Jambi dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kota Jambi dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2013-2017. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Kota Jambi pada penelitian ini adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kota Jambi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Kota Jambi. Berdasarkan data tersebut dapat dihitung rasio-rasio keuangan yang menjadi indikator dari kinerja keuangan Kota Jambi. Adapun dari analisis rasio tersebut adalah sebagai berikut:

#### Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dibawah ini:

**Tabel 1.**

**Penghitungan Rasio DDF Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018**

No	Tahun Anggaran	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	Selisih
1.	2013	37,95	-
2.	2014	35,78	2,17
3.	2015	34,57	1,21
4.	2016	34,85	0,28
5.	2017	32,85	2,00
6.	2018	35,09	2,24

Sumber Data: Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa Kinerja

Keuangan Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang. Dimulai pada tahun 2013 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada Kota Jambi adalah 37,95%.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2. di bawah ini:

**Tabel 2.**

**Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018**

No	Tahun Anggaran	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Selisih
1.	2013	4,01	-
2.	2014	4,20	0,19
3.	2015	4,06	-0,14
4.	2016	3,88	-0,18
5.	2017	4,31	0,43
6.	2018	4,50	0,19

Sumber Data: Kota Jambi (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 2. di atas kemampuan keuangan Kota Jambi tergolong masih rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan jalannya roda pemerintahan Kota Jambi melalui politik anggaran. Dengan demikian pemerintah daerah Kota Jambi masih jauh dari kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sampai dengan tahun 2015 rasio kemandirian Kota Jambi tidak pernah beranjak dari nilai 3% - 5%, bahkan pada tahun 2018.

#### Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target



yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada Tabel 4.3. di bawah ini:

**Tabel 3.**

**Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2017**

No	Tahun Anggaran	Rasio Efektivitas PAD (%)	Selisih
1.	2013	94,61	-
2.	2014	102,86	8,25
3.	2015	101,79	-1,07
4.	2016	94,47	-7,32
5.	2017	79,92	-14,55
6	2018	86,90	6,98

*Sumber Data: Kota Jambi (diolah)*

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3. dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kota Jambi mencapai titik tertinggi pada tahun 2014 sebesar 102,86%, dan kondisinya terus mengalami fluktuasi hingga mencapai titik terendah pada tahun 2017 yaitu hanya sebesar 79,92%. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAD Kota Jambi hanya efektif terjadi pada tahun 2014 dan 2015, sedangkan tahun-tahun yang lain berjalan tidak efektif, karena efektivitasnya masih dibawah 100%.

**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah**

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4. di bawah ini:

**Tabel 4.**

**Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018**

No.	Tahun Anggaran	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (%)	Selisih
1.	2013	97,78	-
2.	2014	99,03	1,25
3.	2015	99,35	0,32
4.	2016	111,25	11,9
5.	2017	103,72	-7,53
6	2018	102,70	1,02

*Sumber Data: Kota Jambi (diolah)*

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4. dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 rasio efektivitas keuangan Pemerintah Kota Jambi cenderung fluktuatif, tetapi selama lima tahun efektivitas kinerja keuangan pemerintah Kota Jambi masih dalam kisaran kurang efisien, yaitu berada dalam rentang 90 – 100 persen.

Bahkan pada tahun 2016, efektivitasnya mencapai 111,25%. Kondisi ini dapat diartikan bahwa realisasi belanja masih berada dibawah modal yang berasal dari pendapatan daerah. Dengan demikian, masih banyak sektor-sektor pembangunan yang tidak berjalan secara optimal, atau memiliki serapan anggaran yang tidak optimal atau maksimal.

**Rasio Keserasian**

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah mengalokasikan dananya pada belanja modal secara optimal. Hasil dari perhitungan Rasio Keserasian dapat dilihat pada Tabel 5. di bawah ini:

**Tabel 5.**

**Rasio Keserasian Kota Jambi Periode Tahun Anggaran 2013-2018 (Belanja Modal)**

No.	Tahun Anggaran	Rasio Belanja Modal (%)	Selisih
1.	2013	48,96	-
2.	2014	49,72	0,76
3.	2015	49,95	0,23
4.	2016	54,02	4,07
5.	2017	23,73	-30,29
6	2018	30,01	6,28

*Sumber Data: Kota Jambi (diolah)*

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 5. di atas diketahui bahwa Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Jambi selama periode tahun 2013 – 2014 berkisar antara 17,72% - 48,96%. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 54,02.

**PEMBAHASAN**

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Hasil perhitungan rasio desentralisasi fiskal Kota Jambi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1. tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 37,95%. Sedangkan untuk nilai terendah adalah pada tahun 2017 dengan rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 32,85. Hal ini menunjukkan bahwa PAD di Kota Jambi masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kondisi tersebut disebabkan kurang optimalnya upaya pemerintah dalam menggali penerimaan dari sektor pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2016) di Sragen dijelaskan bahwa Kinerja Keuangan Kotamadya Sragen tahun 2002-2014 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Kurang karena rata-rata

rasionya sebesar 9,69%. Hal tersebut kurang lebih hampir sama dengan apa yang terjadi di Kota Jambi dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 6,57% dan tergolong Sangat Kurang meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya. Menurut Sri Wahyuni permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kota Jambi Sragen adalah ketidakmampuan pemerintah daerah yang bersangkutan untuk menggali potensi-potensi daerah yang ada guna meningkatkan PAD dan ketergantungan yang masih sangat besar terhadap bantuan ataupun pinjaman dari pemerintah pusat. Begitupun juga yang terjadi di Kota Jambi, apabila dilihat dari hasil penerimaan pajak Kota Jambi yang tidak pernah mencapai angka 50% atau lebih menunjukkan bahwa pemerintah Kotamadya Tebi tidak optimal atau tidak mampu menggali potensi-potensi penerimaan yang ada, sehingga ketidakmampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang ada tersebut menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Jambi dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal masih tergolong sangat kurang.

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2. Sampai dengan tahun 2015 rasio kemandirian Kota Jambi tidak pernah beranjak dari nilai 3% - 5%, bahkan pada tahun 2017, rasio kemandirian Kota Jambi mencapai titik terendah, yaitu sebesar 3,82%. Sebagaimana telah disebutkan bahwa, berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2. kemampuan keuangan Kota Jambi

tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0% - 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri. Rasio Kemandirian yang masih rendah mengakibatkan kemampuan keuangan daerah Kota Jambi dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan Kota Jambi secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang dapat digali dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat digali secara optimal. Sektor-sektor potensial yang ada di Kota Jambi belum mampu memberikan sumbangan PAD secara optimal.. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Jambi sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Widada (2017) Kinerja Keuangan Daerah Kotamadya Klaten pada tahun 2014-2017 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong

rendah sekali atau instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 64,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kota Jambi pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya sebesar 54,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong instruktif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hampir sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ( $x < 100\%$ ) berarti tidak efektif
2. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ( $x = 100\%$ ) berarti efektivitas berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ( $x > 100\%$ ) berarti efektif.

Menurut hasil perhitungan pada Tabel 3. Efektivitas Kinerja Keuangan Kota Jambi cenderung masih tidak efektif karena rata-rata efektivitasnya di bawah angka 100%. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih lebih rendah daripada yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang masih kurang optimal dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Sehingga untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program

kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2015) yang melakukan penelitian di Kotamadya Blitar dijelaskan bahwa kinerja keuangan Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD sudah Efektif. Begitupun juga dalam penelitian ini dimana kinerja keuangan Kota Jambi sudah efektif. Kedua daerah ini dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Jambi yang tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 99,61% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih lebih besar daripada pendapatan daerahnya terutama pada tahun 2016 dan 2017. Meskipun pada tahun 2016 dan 2017 tersebut Pemerintah Kota Jambi sudah dapat menekan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan dengan belanja daerahnya. Sehingga dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya

diharapkan Pemerintah Kota Jambi dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Andi Melisa Anastasia. B (2017) di Kotamadya Bulukumba, Sulawesi Selatan Kinerja keuangannya jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sudah Efisien karena rata-ratanya sebesar 87,34%. Menurut peneliti hal tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Jambi Bulukumba sudah berhasil menerapkan efisiensi anggarannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi dalam penelitian ini dimana efisiensi keuangan Pemerintah Kota Jambi Tidak Efisien.

### **Rasio Keserasian**

Rasio keserasian yang dilihat dari aspek belanja modal yang terjadi pada tahun 2016 merupakan rasio keserasian yang terbaik, karena anggaran belanja Kota Jambi lebih dari 50% digunakan untuk belanja modal yang tidak lain adalah belanja pembangunan. Tingginya belanja modal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi menganggarkan dan merealisasikan pembelian peralatan dan mesin hingga sebesar Rp. 41,273 miliar. Peralatan dan mesin yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah berupa pengadaan mobil dinas, pembelian mobil pemadam kebakaran, dan berbagai jenis peralatan dan mesin yang lainnya.
2. Pemerintah Kota Jambi juga membangun kantor, merenovasi dan membangun sekolah-sekolah, perbaikan dan pembangunan terminal, serta pengembangan pasar, sehingga menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pos anggaran belanja gedung dan bangunan yang mencapai angka Rp. 66,824 miliar.
3. Banyaknya jalan yang rusak, dan pembukaan daerah-daerah baru yang membutuhkan akses menyebabkan Pemerintah Kota Jambi membutuhkan dana lebih untuk mengisi pos anggaran belanja jalan, jaringan dan irigasi hingga mencapai angka Rp. 161,784 miliar.

4. Pada tahun 2016, pemerintah Kota Jambi juga menganggarkan dana untuk pengadaan komputer guna menunjang pelayanan publik sampai kepada kecamatan dan desa. Untuk itu pada tahun 2016 Pemerintah Kota Jambi menganggarkan hingga mencapai Rp. 7,735 miliar. Anggaran yang cukup besar untuk memenuhi pos belanja aset tetap lainnya untuk delapan kecamatan yang ada di Kota Jambi.

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Meskipun demikian Darmadji dan Tan (2008) menyatakan bahwa untuk daerah di negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar.

Rasio keserasian Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 mencapai nilai terendah, yaitu hanya sebesar 17.72%. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2014 cenderung memprioritaskan belanja operasional dari pada belanja modal atau belanja pembangunan. Kondisi ini berbeda dengan tahun 2016 ketika anggaran Kota Jambi lebih banyak diarahkan untuk pembangunan. Belanja operasional pada tahun 2014 yang mencapai angka Rp. 299,761 miliar ternyata menggerus lebih dari 80% pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Jambi.
2. Meningkatnya jumlah belanja pegawai yang mencapai angka Rp. 244,772 miliar dan belanja barang dan jasa sebesar Rp.



49,007 miliar telah menyebabkan anggaran tahun 2014 lebih banyak digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal. Kondisi ini mengakibatkan menurunnya rasio keserasian.

Dari Tabel 4.5. itu juga dapat dilihat bahwa rasio belanja modal yang belum stabil dari tahun ke tahun. Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Jambi kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Jambi diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Kurang, Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Jambi masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan wilayahnya.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Kota Jambi tahun 2013 dan 2017 berjalan Tidak Efektif .
4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kurang Efisien.
5. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari Rasio Keserasian adalah belum stabil dari tahun ketahun.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anita Wulandari, 2011, Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Jambi Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah, *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Kemampuan Keuangan Daerah* Vol, 5, No, 2, November.
- Aries Djaenuri, 2012, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Choiriyah, Umi. 2010. *Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Danang Prio Utomo, 2011, Analisa Rasio Keuangan APBD Sebagai Tolak Ukur Penilaian Kinerja Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2007-2009, *Jurnal Education* Vol. 6 No. 2, Desember 2011, hal. 57-80
- Darmadji, E.S.S.H. dan Tan, Y., 2008, *Metode Penelitian Akuntansi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Djanegara, Meormahadi, S. 2011, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik dan Permasalahan*, Kesatuan Press, Jakarta.
- Fitriyah Agustin, 2007, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.

- Halim, A., 2007, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, A., 2015, *Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Ketiga*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hendro Sumarjo, 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- I Dewa Gde Bisma dan Hery Susanto, 2010, Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007, *GaneÇ Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3*, Desember 2010.
- John, M.Y. dan Setiawan, D.S., 2011, *Kiat Memahami Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Kus Endang Muji Rahayu, 2014, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012, UMS, Surakarta.
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahsun, M., 2009, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, BPFE, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2012, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mariani, 2013, Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pemekaran. Undip, Semarang
- Mentari Wachid, dkk. 2013, *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2008-2012*. Unibraw, Malang.
- Mirna Sesotyaningsih, 2012, Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental, Revenue, dan Pendapatan Pajak Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Muhamad Rudiyanto, 2015, Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Studi Pada Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Provinsi Banten, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nurhidayat, 2005, *Otonomi Daerah Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU RI No, 32 Tahun 2004 & UU RI No, 33 Tahun 2004*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang Retribusi Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- PP Nomor 105 tahun 2000.
- Puspitasari, Ayu Febriyanti. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 1. No 2. Semester Genap 2012/2013
- Rahayu 2014, Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008-2012. UMS, Surakarta.
- Raihanna, 2012, Analisa Kinerja Keuangan Kota Jambi 2002-2011, UNJA, Jambi.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. Pengaruh Leverage, Ukuran Legislatif, Intergovernmental Revenue dan Pendapatan Pajak Daerah terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  
(Studi Empiris pada Pemerintah  
Daerah Kabupaten/Kota di Jawa).  
*Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi.  
Universitas Negeri Semarang

Sri Wahyuni, 2008, Analisis Kemampuan  
Keuangan Daerah Pemerintah  
Kabupaten Sragen Dalam Mendukung  
Pelaksanaan Otonomi Daerah, *Skripsi*  
Fakultas Ekonomi Universitas  
Muhammadiyah Surakarta.

Sri Widada, 2012, Analisis Kinerja Keuangan  
Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Klaten, *Skripsi* Fakultas Ekononmi  
Universitas Negeri Yogyakarta.

Sumarjo, 2010, *Keuangan Negara Dalam  
Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.

Syamsi, I., 2006, *Pokok-Pokok  
Kebijaksanaan, Perencanaan,  
Pemrograman, Dan Penganggaran  
Pembangunan Tingkat Nasional Dan  
Regional*, CV Rajawali, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Weill, Laurent. 2003. Leverage and Corporate  
Performance: A Frontier Efficiency  
Analysis on European Countries.  
Working Paper. Working Paper Series.  
SSRN May.

Wenny, 2012, Pengaruh Pendapatan Asli  
Daerah PAD Terhadap Kinerja  
Keuangan Pada Pemerintah  
Kabupaten dan Kota di Provinsi  
Sumatera Selatan. USU, Medan

Widodo, 2015, *Manajemen dan Akuntansi  
Keuangan Daerah*, UGM,  
Yogyakarta.

Zuhri, Muhammad dan Ahmad Soleh, 2017,  
*Analisis Kinerja Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur*,  
Ekombis Reviews. Fakultas Ekonomi  
Universitas Dehasen Bengkulu.